

RESENSI BUKU

Pentingnya memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur pancasila dalam kehidupan kita sebagai sebuah bangsa

Judul	: Rindu Pancasila
Penulis	: Jakob Oetama, dkk.
Tebal Buku	: xxvi + 278 hlm
Ukuran	: 14 cm x 21 cm
Penerbit	: Jakarta, PT Kompas Media Nusantara
Penyunting	: Mulyawan Karim

Barrack Hussein Obama, presiden Amerika Serikat berkunjung ke Indonesia. Kuliah umumnya di Universitas Indonesia menyadarkan kita semua bahwa sebenarnya Indonesia adalah bangsa yang besar, yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Dia mengingatkan kita, dengan modal dasar yang kita punyai, yaitu keberagaman, serta nilai-nilai baik (*good values*) yang kita anut, bukan tidak mungkin bahwa pada suatu saat nanti Indonesia akan menjadi rujukan bagi negara lain dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi dan menjadi negara yang maju dan sejahtera.

Kesadaran tentang betapa Indonesia mempunyai potensi untuk menjadi bangsa yang besar tidaklah cukup apabila tidak diikuti dengan usaha yang keras dan dengan meningkatkan rasa saling pengertian, toleransi, saling menghargai, serta dengan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur dari falsafah kita dalam berkehidupan berbangsa, yaitu panca-

sila. Semua komponen bangsa secara serentak harus mulai bergerak bersama menuju satu tujuan yaitu bangsa yang maju, adil dan sejahtera. Untuk itulah buku kecil yang langka ini dikompilasi dari tulisan beberapa penulis terkemuka Indonesia untuk menyadarkan kita tentang pentingnya menggali kembali nilai-nilai luhur pancasila dan berupaya mengimplementasikannya dalam kehidupan berbangsa. Buku ini diterbitkan oleh PT Kompas Media Utama dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 65 tahun 2010.

Buku yang terdiri dari 7 bab ini diawali dengan prawacana oleh dua pionir harian Kompas, Jakob Oetama dan Rikard Bangun tentang refleksi hari proklamasi, dan bagaimana selama perjalanan kita sebagai sebuah bangsa kita telah mengabaikan nilai-nilai pancasila. Hal inilah yang menyebabkan kita seolah tak tahu arah atau tersesat dalam meraih cita-cita sebagai bangsa yang besar. Kemudian dalam lima bab

berturut-turut, tulisan dari berbagai penulis terkemuka dikelompokkan sesuai dengan tema masing-masing sila dari Pancasila. Dua bab terakhir adalah tentang menimbang ulang makna kemerdekaan dan kaitannya dengan kepemimpinan nasional yang kita butuhkan.

Pada abad ke-21 ini ancaman terbesar yang kita hadapi adalah menjadi “negara gagal” seperti apa yang disitir oleh Francis Fukuyama lima tahun yang lalu. Ancaman “negara gagal” itu ditandai dengan meluasnya kemiskinan, pengangguran, konflik antar kelompok, dan merebaknya aksi terror. Kemudian diperparah lagi dengan meluasnya tindakan koruptif para pejabat publik. Dengan demikian saat ini kita sedang menghadapi krisis sosial, intelektual, moral, dan yang terparah adalah krisis karakter yang menjurus kepada krisis identitas bangsa.

Pancasila sebagai rumusan cemerlang para pendiri bangsa kita merupakan nilai-nilai luhur yang sebenarnya mengalir dalam darah setiap insan Indonesia. Apabila diimplementasikan dengan benar seharusnya dia dapat menjadi alat untuk mengantisipasi dari terjadinya negara gagal tersebut. Menyangkut sila pertama dari Pancasila, yang merupakan “roh” dari keempat sila lainnya, perlu dikaji ulang bentuk hubungan antara negara dan agama, serta implementasi prinsip negara berketuhanan dan konstitusi. Pancasila dengan sila pertamanya, adalah sebuah falsafah yang sesuai dan bersahabat dengan agama. Oleh karena itu, yang perlu ditingkatkan hanyalah kesalehan sosial, dan menyadari realitas kemajemukan Indonesia sebagai sebuah

berkah, yang perlu dikembangkan dan ditempatkan sebagai dasar ideologi bernegara. Keberagaman semestinya tidak bersifat hierarkis, melainkan egaliter, dan oleh karena itu berimplikasi pada nilai etis toleransi. Kemudian sebagai umat yang mengakui dan mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan, semestinya agama dapat menanamkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, kejujuran, dan kemuliaan, sehingga meningkatkan moral bangsa.

Fokus dari sila kedua Pancasila adalah nilai kemanusiaan. Kemanusiaan yang dimaksud adalah kemanusiaan yang beradab, yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan itu sendiri, yang dimanifestasikan dalam semangat saling menghargai, yang toleran, yang dalam perilaku sehari-hari didasarkan pada nilai-nilai moral yang tinggi, serta untuk kepentingan bersama. Dengan mengimplementasikan sila kedua ini diharapkan bahwa karut marut yang dialami bangsa saat ini seperti tidak adanya toleransi, konflik antar golongan, pengangguran, kemiskinan, mafia kasus, korupsi, diskriminasi dan kesenjangan sosial, tindakan kekerasan, baik secara vertikal maupun horizontal, dapat dieliminasi.

Indonesia adalah negara luar biasa yang terbangun atas keberagaman, suku, agama, bahasa, budaya, dan hidup tersebar pada wilayah yang sangat luas. Namun dengan terbentuknya NKRI, dimulailah komitmen bersama untuk terus membentengi keberagaman itu untuk terbangunnya Indonesia yang maju dan sejahtera. Itulah makna dari sila persatuan Indonesia. Sesuai dengan tujuan negara yang diamanatkan dalam konstitusi, negara berkewajiban mem-

berikan perlindungan bagi segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh isinya dengan semangat persatuan tersebut. Pemerintah harus memberikan perlakuan yang sama bagi seluruh warganya di manapun mereka berada, tanpa memandang apa latar belakang suku, budaya, maupun agamanya. Di pihak lain, warga negara dalam semangat kebersamaan melakukan tindakan yang tetap fokus dalam koridor NKRI untuk kebahagiaan dan kemajuan bersama. Semangat persatuan inilah yang harus terus dijaga agar NKRI tetap eksis, dan dapat menjadi kuat karena terbangun dari jalinan keberagaman yang harmonis.

Mewujudkan negara yang demokratis diamanatkan oleh konstitusi, di mana kedaulatan diserahkan kepada rakyat. Sila keempat pancasila adalah pedoman berdemokrasi Indonesia. Namun bagaimana mengimplementasikan demokrasi *a la* Indonesia masih dalam tahap pencarian identitas. Sejak merdeka, Indonesia telah melalui beberapa tahapan demokrasi, yaitu demokrasi masa revolusi, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi era orde baru dan demokrasi era reformasi.

Bagaimana dasar demokrasi khas Indonesia, dikemukakan oleh Soekarno di depan sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Soekarno berpidato, "... Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara, 'satu untuk semua', satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk

kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan" (Amin Arjoso ed. 2002, hal 25). Jadi kata kunci dari demokrasi Indonesia adalah musyawarah mufakat. Namun dalam praktiknya, politik Indonesia menunjukkan pudarnya permusyawaratan untuk mufakat. Sebaliknya tren baru mengarah pada demokrasi transaksional. Uang adalah alat dalam transaksi politik, yang pada gilirannya kelompok yang mempunyai banyak uanglah yang akan menang dalam transaksi. Inilah yang pada akhirnya dikhawatirkan akan memberikan negara kepada kendali suatu kelompok tertentu. Kondisi ini akan diperparah apabila demokrasi ekonomi, dan sosial tidak dilakukan, dan pemimpin yang visioner tidak dimiliki. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang gagasan demokrasi sesungguhnya sesuai dengan amanat sila ke-empat pancasila.

Kemudian, tujuan terakhir dari kemerdekaan adalah negara yang maju, adil, dan sejahtera. Hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya. Rakyat terbebas dari tekanan dalam bentuk apapun, baik fisik maupun kejiwaan, terbebas dari kemiskinan, dan kebodohan, serta dari tekanan pihak asing. Pemerintah berpihak kepada rakyat yang harus dibela, bukan kepada golongan tertentu yang mempunyai kepentingan. Itulah prinsip keadilan yang terkandung dalam sila kelima. Namun sesungguhnya prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi anak tangga pertama yang harus dipijak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan dalam konteks aturan, kebijakan, tindakan, dan perlakuan yang adil terhadap rakyatnya_ dapat membuat masyarakat

leluasa bermusyawarah dan bermufakat mencari solusi persoalan. Keadilan membuat bangsa lebih mudah menyatakan kekuatan membangun kemakmurannya yang bermartabat. Keadilan juga akan mempertebal rasa kemnusiaan dan saling mencintai sesama ciptaan Tuhan. Akhirnya keadilan dapat membuat setiap orang tenang beribadah tanpa harus merasa terancam oleh kelompok lain yang berbeda keyakinan.

Merefleksi makna kemerdekaan yang sudah berumur 65 tahun, kita perlu merenungkan sudah sampai dimanakah perjalanan kita sebagai bangsa yang benar-benar merdeka. Dalam kenyataan masih banyak masyarakat yang belum merasakan nikmatnya kemerdekaan, masih banyak rakyat yang dibelenggu kemiskinan, kebodohan, tidak leluasa mengekspresikan kecintaannya kepada Tuhannya, pemimpin dan aparat negara sering abai terhadap penderitaan rakyat, dan hukum masih sering berpihak kepada yang membayar, bukan kepada yang benar. Pancasila yang diagungkan sebagai falsafah bangsa dan fondasi kehidupan kenyataannya lebih sering dipajang sebagai simbol belaka. Kalau ini yang terjadi berarti kita tidak mampu belajar dan meneruskan cita-cita para pendiri bangsa kita tentang hidup bersama sebagai bangsa. Oleh karena itu, sudah saatnya kita perlu mengeksplorasi, memahami, dan mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dalam setiap aspek kehidupan agar cita-cita kemerdekaan dapat diwujudkan.

Prima Roza